



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024** ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Nias Selatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan ini disusun berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi guna memberikan gambaran mengenai capaian kinerja yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024. Penyusunan LAKIP ini mengacu pada ketentuan yang berlaku, dengan harapan dapat menjadi dasar dalam perbaikan kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Teluk Dalam, 21 Februari 2025

Kepala Bapperida Kabupaten Nias Selatan,



ABDIEL SONASA AMAZIHONO, SSTP, .M.Ec.Dev
Pembina Tk.I
NIP. 19830826 200112 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Nias Selatan dalam mewujudkan sasaran yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026 dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Rincian realisasi masing-masing target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 *Meningkatnya kinerja perencanaan Pemerintahan Daerah*

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai AKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	40.13	32.69	81%
Persentase Hasil Kajian yang Dimanfaatkan sebagai Dasar Perumusan Kebijakan	100%	100%	100%

Sasaran 2 *Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang inovatif*

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Inovasi Daerah	40	35.01	88%

Berdasarkan tabel indikator kinerja Bapperida Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2024, secara umum target yang ditetapkan telah tercapai dengan kategori tinggi dan sangat tinggi. Namun, masih diperlukan peningkatan kualitas perencanaan dan inovasi untuk mencapai target yang lebih optimal.

Dalam mencapai sasaran tersebut, terdapat 4 (empat) program yang dilaksanakan dengan jumlah pagu sebesar Rp. 3.677.509.250,- (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.557.900.731,- (Tiga milyar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu tujuh puluh satu rupiah) atau 96,75%.

Dengan pencapaian ini, diharapkan Bapperida Kabupaten Nias Selatan dapat terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan pembangunan daerah guna mencapai target yang lebih optimal di tahun-tahun mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.2.1 Kedudukan.....	2
1.2.2 Tugas	2
1.3 Struktur Organisasi.....	3
1.4 Sumber Daya Manusia.....	6
1.5 Sarana dan Prasarana	8
1.6 Isu Strategis	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis 2021 - 2026	12
2.2 Perjanjian Kinerja	15
2.3 Rencana Kinerja Tahunan.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	30
B. Realisasi Anggaran	42
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	49
LAMPIRAN	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekapitulasi ASN Bapperida Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Golongan.....	6
Tabel 1. 2 Rekapitulasi ASN Bapperida Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Tabel 1. 3 Rekapitulasi ASN Bapperida Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Tabel 1. 4 Sarana dan Prasarana Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024	8
Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Bapperida Kabupaten Nias Selatan Menurut Renstra Tahun 2021 – 2026	14
Tabel 2. 2 Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 – 2026.....	14
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024	15
Tabel 2. 4 Program dan Anggaran Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024	16
Tabel 2. 5 Rencana Kinerja Tahunan Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024	17
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	30
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024	31
Tabel 3. 3 Daftar Inovasi Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024	33
Tabel 3. 4 Hasil Evaluasi Akip Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 - 2024	34
Tabel 3. 5 Analisis Faktor Keberhasilan dan Kegagalan.....	36
Tabel 3. 6 Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	37
Tabel 3. 7 Perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran.....	39
Tabel 3. 8 Capaian Realisasi Anggaran Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024	42

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Kondisi SDM Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024	38
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Nias Selatan.....	5
Gambar 1. 2 Persentase Tingkat Pendidikan ASN Bapperida Tahun 2024... ..	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam perencanaan, Riset dan Inovasi daerah, Bapperida memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran capaian kinerja Bapperida sepanjang tahun 2024, berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Dokumen ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui LAKIP, diharapkan dapat dilakukan analisis terhadap efektivitas kebijakan serta peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan program/kegiatan yang lebih berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.

Adapun tujuan di susunnya LAKIP adalah sebagai berikut :

1. Memberikan laporan kepada pemangku kepentingan mengenai pencapaian kinerja Bapperida selama tahun 2024 berdasarkan target yang telah ditetapkan;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menyajikan informasi yang transparan dan akuntabel terkait pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Menyediakan data dan informasi berbasis hasil (*outcome*) untuk digunakan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat guna di masa mendatang;
4. Mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan serta menganalisis faktor keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja;
5. Sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan Masyarakat;
6. Menjalankan kewajiban instansi dalam menyusun dan menyampaikan laporan kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta regulasi terkait lainnya.

Dengan disusunnya LAKIP Tahun 2024, Bapperida berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

1.2.1 Kedudukan

Bapperida adalah unsur pendukung kepala daerah dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan strategis. Secara struktural, Bapperida berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan Bapperida diatur dalam berbagai peraturan perundangan-undangan, antara lain :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan

1.2.2 Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_58 tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan yang kemudian telah di ubah melalui Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Nias Selatan menyatakan bahwa Bapperida melalui Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang, bidang penelitian dan pengembangan serta fungsi riset dan inovasi daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bapperida Kabupaten Nias Selatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan serta fungsi riset dan inovasi daerah;
- b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan serta fungsi riset dan inovasi daerah;

- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan serta fungsi riset dan inovasi daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan serta fungsi riset dan inovasi daerah;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan serta fungsi riset dan inovasi daerah;
- f. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

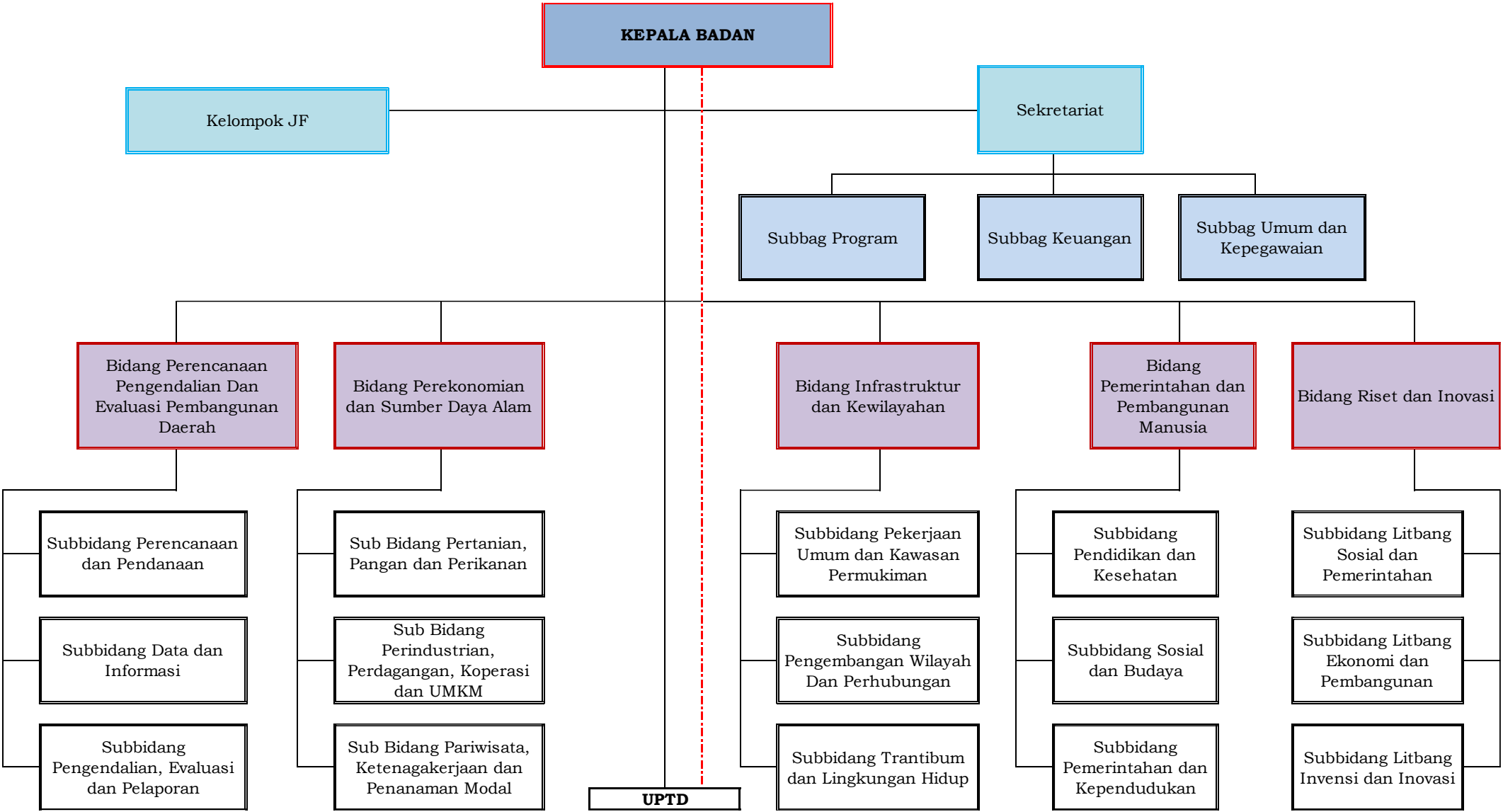
1.3 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Nias Selatan, susunan organisasi terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - 2. Sub Bidang Data dan Informasi;
 - 3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan;
 - 2. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
 - 3. Sub Bidang Pariwisata, Ketenagakerjaan dan Penanaman Modal.
- e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah Dan Perhubungan;
 - 3. Sub Bidang Trantibum dan Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan;

2. Sub Bidang Sosial dan Budaya;
 3. Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan.
- g. Bidang Riset dan Inovasi, terdiri dari :
1. Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan;
 3. Sub Bidang Litbang Inovasi dan Inovasi.
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional
- Dari uraian susunan organisasi diatas maka bagan struktur organisasi Bapperida Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Nias Selatan



1.4 Sumber Daya Manusia

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di Bapperida Kabupaten Nias Selatan telah dilakukan secara optimal melalui peningkatan kompetensi, redistribusi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penguatan budaya kerja berbasis kinerja. Pada tahun 2024, jumlah SDM yang dimiliki sebanyak 41 orang, terdiri dari 32 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 9 orang tenaga harian lepas. Komposisi ASN Bapperida berdasarkan pangkat dan golongan, jenis kelamin serta tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Pangkat dan Golongan

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bapperida Kabupaten Nias Selatan adalah 1 (satu) orang Eselon II yaitu kepala badan; 6 (enam) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris dan 5 (lima) orang kepala bidang, 18 (delapan belas) orang Eselon IV terdiri dari 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian dan 15 (lima belas) orang Kepala Sub Bidang serta di dukung 5 (lima) orang fungsional yakni 2 (dua) orang analis, 1 (satu) orang fasilitator pemerintahan, 1 (satu) orang pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan, 2 (dua) orang administrasi umum dan 1 (satu) orang bendaharawan.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi ASN Bapperida Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan														
		IV					III					II				
		a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	Jml
1	Kepala	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	1	-	-	-	1	-	1	1	1	3	-	-	1	1	2
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	2	-	3	1	6	-	-	-	-	-
4	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	-	-	-	-	-
5	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1	-	-	-	1	-	-	-	3	3	-	-	-	1	1
6	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	-	-	-	-	-
7	Bidang Riset dan Inovasi	-	1	-	-	1	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-
Total		2	2	-	-	4	3	1	10	11	25	-	-	1	2	3

2. Jenis Kelamin

Komposisi ASN Bapperida Kabupaten Nias Selatan berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 26 orang laki-laki dan perempuan sebanyak 6 orang sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. 2 Rekapitulasi ASN Bapperida Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala	1	0	1
2	Sekretariat	4	2	6
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	6	0	6
4	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	5	1	6
5	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4	1	5
6	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3	1	4
7	Bidang Riset dan Inovasi	3	1	4
TOTAL		26	6	32

3. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data yang tersedia, ASN di Bapperida Kabupaten Nias Selatan memiliki tingkat pendidikan yang beragam, dengan mayoritas berpendidikan tinggi (S1 dan S2). Berikut adalah rincian tingkat pendidikan ASN berdasarkan unit kerja:

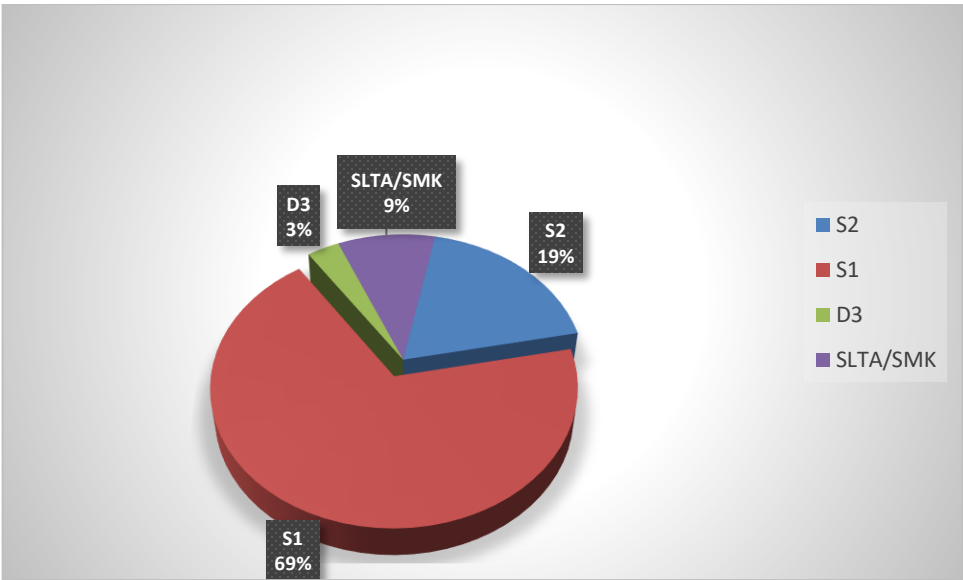
Tabel 1. 3 Rekapitulasi ASN Bapperida Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Pendidikan										Jumlah
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA /SMK	SLTP	SD	
1	Kepala	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	-	3	-	1	-	-	2	-	-	6
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	6
4	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6
5	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	1	3	-	-	-	-	1	-	-	5
6	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4
7	Bidang Riset dan Inovasi	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	4
TOTAL		-	6	22	-	1	-	-	3	-	-	32

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas pegawai telah memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dari total 32 ASN, sebanyak 2 (dua) orang atau 19 % berpendidikan Strata

2 (S2), 22 (dua puluh dua) orang atau 69 % berpendidikan Strata 1 (S1), 1 (satu) orang atau 3% berpendidikan Diploma (D3/D4), dan 3 (tiga) orang atau 9% berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Dengan komposisi ini, Bapperida terus berupaya meningkatkan kompetensi SDM melalui program pendidikan lanjutan, pelatihan, serta pengembangan kapasitas agar mampu mendukung perencanaan pembangunan daerah secara lebih optimal.

Gambar 1. 2 Persentase Tingkat Pendidikan ASN Bapperida Tahun 2024



1.5 Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Nias Selatan telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai. Hingga tahun 2024, sarana dan prasarana yang dimiliki Bapperida dalam menunjang keberhasilan pencapaian tujuan telah cukup memadai meskipun ada beberapa yang perlu penambahan atau penggantian barang karena sudah usang atau tidak layak pakai. Berikut adalah daftar sarana dan prasarana yang dimiliki Bapperida per 31 Desember 2024 berdasarkan laporan asset :

Tabel 1. 4 Sarana dan Prasarana Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	216
	KOMPUTER	64
	- P.C Unit	12
	- Lap Top	23
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	23
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5
	- Server	1

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
	ALAT ANGKUTAN	7
	- Sport Utility Vehicle (SUV)	1
	- Sepeda Motor	6
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	144
	- Mesin Penghitung Uang	1
	- Lemari Besi/Metal	11
	- Lemari Kayu	24
	- Brandkas	1
	- Laci Box	7
	- CCTV - Camera Control Television System	1
	- Alat Penghancur Kertas	4
	- LCD Projector/Infocus	5
	- Meja Kerja Kayu	13
	- Meja Rapat	14
	- Meja 1/2 Biro	15
	- Sofa	1
	- A.C. Split	16
	- Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	4
	- Kipas Angin	8
	- Amplifier	2
	- Loudspeaker	4
	- Sound System	1
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	11
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	1
	- Genset	1
	Total	216

1.6 Isu Strategis

Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah, terdapat beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian Bapperida pada tahun 2024. Isu-isu ini berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian target pembangunan daerah.

Berikut isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Bapperida pada tahun 2024 :

- 1. Perencanaan Pembangunan yang Berbasis Data dan *Evidence-Based Policy*;

- Masih terdapat keterbatasan dalam ketersediaan dan pemanfaatan data yang akurat dan terintegrasi untuk mendukung proses perencanaan pembangunan daerah.
 - Diperlukan sistem perencanaan berbasis digital yang mampu mengintegrasikan data sektoral agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan efektif.
2. Sinkronisasi Perencanaan Daerah dengan Kebijakan Nasional dan Regional;
- Tantangan dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan prioritas nasional dan regional, seperti RPJMN, RKP, serta kebijakan pembangunan provinsi
 - Bapperida harus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, serta perangkat daerah lainnya untuk memastikan harmonisasi kebijakan.
3. Efektivitas Penganggaran Berbasis Kinerja;
- Implementasi *Money Follow Program* dalam sistem penganggaran masih menghadapi kendala dalam penyelarasan antara perencanaan program, penganggaran, dan pencapaian output yang terukur.
 - Diperlukan penguatan sistem evaluasi kinerja agar alokasi anggaran lebih efisien dan tepat guna sesuai dengan target pembangunan daerah.
4. Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan untuk Mendukung Kebijakan;
- Fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) sebagai dasar penyusunan kebijakan masih perlu dioptimalkan melalui pemanfaatan hasil riset dan kajian akademik.
 - Bapperida perlu memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, serta sektor swasta dalam menghasilkan inovasi kebijakan yang berbasis bukti
5. Optimalisasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Implementasi SAKIP masih perlu ditingkatkan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan berbasis outcome, bukan hanya output administratif.
 - Evaluasi kinerja berbasis *Key Performance Indicators* (KPI) dan penerapan reward and punishment bagi perangkat daerah menjadi langkah strategis dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja
6. Penguatan Kapasitas SDM dalam Perencanaan dan Pengelolaan Pembangunan;

- Kualitas sumber daya manusia (SDM) perencana masih menjadi tantangan, terutama dalam penggunaan teknologi perencanaan, analisis big data, serta pemahaman terhadap pendekatan pembangunan terbaru.
- Diperlukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan.

7. Digitalisasi dan Inovasi dalam Pelayanan Publik;

- Transformasi digital dalam layanan perencanaan dan pengembangan daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur dan kesiapan SDM.
- Bapperida perlu mempercepat digitalisasi dan inovasi dalam Pelayanan publik untuk meningkatkan efektivitas perencanaan serta akuntabilitas pembangunan daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2021 - 2026

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 maka telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Nias Selatan untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan. Adapun visi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun adalah “ **Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera** ”. Visi tersebut dimanifestasikan ke dalam 5 (lima) misi, yaitu :

- 1) Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan;
- 2) Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif;
- 4) Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif dan Tidak Konsumtif;
- 5) Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat.

Dari 5 (lima) misi diatas sesuai tugas dan fungsi, Bapperida Kabupaten Nias Selatan mendukung pencapaian misi 1 dan 2 sehingga dirumuskan tujuan dan sasaran untuk lima tahun kedepan adalah :

- Tujuan :
 - ***Terwujudnya tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel.***
 - ***Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah***
- Sasaran :

- **Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM Perencana**
- **Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah**
- **Meningkatnya hasil kajian penelitian dan pengembangan**

Selanjutnya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi dan arah kebijakan Bapperida Kabupaten Nias Selatan untuk Tahun 2021-2026 adalah :

➤ **Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM Perencana**
Strategi :

- Memberikan kesempatan kepada SDM perencana untuk mengembangkan kualitas dan kompetensinya;
- Melakukan penataan sistem manajemen SDM aparatur Bappeda.

Arah Kebijakan :

- Pendidikan dan pelatihan perencanaan baik formal maupun non formal;
- Penerapan SOP terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

➤ **Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah**
Strategi :

- Meningkatkan konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan;
- Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah

Arah Kebijakan :

- Optimalisasi pemanfaatan sistem teknologi informasi;
- Peningkatan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- Optimalisasi proses asistensi, monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui Focus Group Discussion (FGD)

➤ **Sasaran 3 : Meningkatkan hasil kajian penelitian dan pengembangan**
Strategi :

- Menyediakan dokumen kajian dan penelitian sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah

Arah Kebijakan :

- Penyusunan kajian penelitian dan pengembangan berbasis data.

Untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan pencapaian yang telah diraih maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Kabupaten Nias Selatan pada Renstra Tahun 2021 -2026 yaitu :

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Bapperida Kabupaten Nias Selatan Menurut Renstra Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel		Nilai Lakip	Predikat	CC	B	B	B	B
	1.1.	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM Perencana	Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis	Persen	20	20	20	20	20
			Persentase SOP yang diterapkan	Persen	100	100	100	100	100
2.	Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah		Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	80	90	100	100	100
	2.1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Penjabaran konsistensi sub kegiatan RKPD ke dalam APBD	Persen	70	80	90	100	100
			Persentase usulan musrenbang desa yang terakomodir dalam RKPD	Persen	10	15	20	25	30
			Persentase desa yang melaksanakan musrenbang RKPD tingkat desa	Persen	50	55	60	65	70
	2.2.	Meningkatnya hasil kajian penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	100	100	100	100	100

Berdasarkan laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menilai bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida perlu disesuaikan agar lebih relevan dengan tupoksi serta kebutuhan pengukuran kinerja yang lebih adaptif. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa IKU yang ditetapkan mencerminkan prioritas strategis terbaru serta mampu mengakomodasi dinamika perubahan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Dengan demikian, yang menjadi IKU Bapperida untuk Tahun 2024 - 2026 tidak lagi berpedoman pada IKU yang telah di tetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026, melainkan disesuaikan dengan arah kebijakan terkini serta kebutuhan pencapaian target pembangunan daerah yang lebih terukur dan efektif. Adapun IKU Bapperida pada Tahun 2024-2026 sesuai Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Nias Selatan Nomor : 000.7.2.7/550/01/I/2024 tentang Penetapan Perubahan Indikator Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 – 2026

No.	Sasaran	Indiaktor Kinerja	Satuan	Target		
				2024	2025	2026
1	Meningkatnya kinerja perencanaan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	Poin	40.13	45	50
		Persentase Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan	%	100	100	100

No.	Sasaran	Indiaktor Kinerja	Satuan	Target		
				2024	2025	2026
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang inovatif	Indeks Inovasi daerah	Poin	40	41	42

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*). Perjanjian kinerja Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kinerja perencanaan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	40.13 Poin
		Persentase Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan	100%
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang inovatif	Indeks Inovasi daerah	40 Poin

Untuk memastikan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), diperlukan program-program yang terstruktur, terukur, dan selaras dengan visi serta strategi organisasi. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya guna mencapai hasil yang diharapkan. Berikut adalah program dan anggaran Bapperida sebelum dan setelah perubahan dalam mendukung pencapaian IKU 2024 :

Tabel 2. 4 Program dan Anggaran Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024

No	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / (Berkurang)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,822,855,680	2,350,557,170	527,701,490	DAU
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	446,262,645	397,166,155	(49,096,490)	DAU
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	395,635,045	493,179,295	97,544,250	DAU
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	436,606,630	436,606,630	0	DAU
Jumlah		3,101,360,000	3,677,509,250	576,149,250	

Sebagai tindak lanjut dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja, Bapperida Kabupaten Nias Selatan juga telah menyusun rencana aksi yang lebih detail, yang dibagi setiap triwulan untuk memastikan target sasaran dapat dicapai dengan optimal, serta organisasi mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan masyarakat yang dapat di lihat pada lampiran dokumen ini.

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan merupakan dokumen perencanaan yang berisi program, kegiatan, sub kegiatan yang disertai target pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran. Rencana kinerja tahunan menjadi bagian integral dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai dasar evaluasi terhadap capaian kinerja organisasi. Berikut adalah rencana kinerja tahunan Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 sebelum dan setelah perubahan :

Tabel 2. 5 Rencana Kinerja Tahunan Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024

Kode					Sebelum Perubahan RENJA-PD				Sesudah Perubahan RENJA-PD		
					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	5	6	9	11	12
5											
5	01										
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100 %	2,395,000,000.00	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100 %	2,380,516,870.00
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	12 Dok	52,500,000.00	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	12 Dok	52,498,610.00
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	7,500,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	7,499,100.00
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	7,500,000.00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	7,499,835.00
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	7,500,000.00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	7,499,835.00
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	7,500,000.00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	7,500,200.00
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	7,500,000.00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	7,499,850.00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bapperida Kab.Nias Selatan Tahun 2024

Kode					Sebelum Perubahan RENJA-PD				Sesudah Perubahan RENJA-PD		
					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	5	6	9	11	12
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Lap	7,500,000.00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Lap	7,499,790.00
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	7,500,000.00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	7,500,000.00
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	29 Dok	185,000,000.00	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	29 Dok	156,937,740.00
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Org/Bl n	155,000,000.00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Org/Bl n	126,960,000.00
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	7,500,000.00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	7,479,650.00
5	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	7,500,000.00	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	7,499,000.00
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	12 Lap	7,500,000.00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	12 Lap	7,499,100.00

Kode					Sebelum Perubahan RENJA-PD				Sesudah Perubahan RENJA-PD		
					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	5	6	9	11	12
5	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	7,500,000.00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	7,499,990.00
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah pada SKPD yang tersedia	2 Dok	10,000,000.00	Jumlah dokumen barang milik daerah pada SKPD yang tersedia	1 Dok	4,999,800.00
5	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	5,000,000.00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	
5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dok	5,000,000.00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dok	4,999,800.00
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	30 Org	130,000,000.00	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	30 Org	88,560,000.00
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	30,000,000.00	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	27,000,000.00
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Org	100,000,000.00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Org	61,560,000.00
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	1,502,580,000.00	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	1,676,035,620.00
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	12,100,000.00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	12,158,600.00

Kode					Sebelum Perubahan RENJA-PD				Sesudah Perubahan RENJA-PD		
					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	5	6	9	11	12
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	145,200,000.00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	39 Paket	259,093,050.00
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47 Paket	192,000,000.00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47 Paket	184,272,970.00
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	75,000,000.00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	62,450,000.00
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	27,500,000.00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	14,000,000.00
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	12,000,000.00	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	12,000,000.00
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Lap	1,038,780,000.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Lap	1,132,061,000.00
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	4 Unit	150,000,000.00	Jumlah pengadaan barang milik daerah	6 Unit	15,947,100.00
5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	100,000,000.00	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	50,000,000.00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	5,947,100.00
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100 %	165,950,000.00	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100 %	159,050,000.00
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	129 Lap 5	12,950,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	520 Lap	6,050,000.00

Kode					Sebelum Perubahan RENJA-PD				Sesudah Perubahan RENJA-PD		
					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	5	6	9	11	12
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	15,000,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	15,000,000.00
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	138,000,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	138,000,000.00
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	31 Unit	198,970,000.00	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	76 Unit	226,488,000.00
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	66,970,000.00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	68,620,000.00
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000.00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,118,000.00
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	32,000,000.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	68 Unit	57,750,000.00
5	01				PERENCANAAN						
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah	100 %	565,000,000.00	Tingkat capaian kinerja program RKPD	100 %	386,271,455.00
5	01	02	2		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang tersusun	12 Dok	415,000,000.00	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang tersusun	17 Dok	292,350,260.00

Kode					Sebelum Perubahan RENJA-PD				Sesudah Perubahan RENJA-PD		
					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	5	6	9	11	12
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dok	10,000,000.00	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dok	6,240,150.00
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	5 Dok	20,000,000.00	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	5 Dok	8,904,000.00
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 BA	35,000,000.00	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 BA	44,192,750.00
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	35 BA	25,000,000.00	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	35 BA	19,911,250.00
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 BA	155,000,000.00	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 BA	83,418,750.00
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	350 Usulan	20,000,000.00	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	350 Usulan	12,274,500.00
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dok	150,000,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dok	117,408,860.00

Kode					Sebelum Perubahan RENJA-PD				Sesudah Perubahan RENJA-PD		
					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	5	6	9	11	12
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	85,000,000.00	Persentase Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	42,578,000.00
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dok	10,000,000.00	Jumlah Dokumen Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dok	8,274,000.00
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	63 Org	25,000,000.00	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	63 Org	14,396,000.00
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	50,000,000.00	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	19,908,000.00
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah	5 Dok	65,000,000.00	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah	5 Dok	51,343,195.00
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Lap	25,000,000.00	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Lap	30,925,000.00
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Lap	40,000,000.00	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Lap	20,418,195.00

Kode					Sebelum Perubahan RENJA-PD				Sesudah Perubahan RENJA-PD		
					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	5	6	9	11	12
5	0	0			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang pembangunan manusia	100 %	420,000,000.00	Tingkat Sinkronisasi Renstra/Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RKPD/RPJMD	100 %	397,965,045.00
						Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian dan SDA	100 %		Tingkat Sinkronisasi Renstra/Renja Perangkat Daerah bidang SDA dan Perekonomian dengan RKPD/RPJMD	100 %	
						Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 %		Tingkat Sinkronisasi Renstra/Renja Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD/RPJMD	100 %	
5	0	0	2.0		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	22 Dok	140,000,000.00	Jumlah dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	22 Dok	141,876,000.00
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10 Dok	15,000,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10 Dok	10,263,750.00
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	10 Lap	20,000,000.00	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	10 Lap	10,547,250.00
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 Lap	5,000,000.00	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 Lap	9,214,000.00

Kode					Sebelum Perubahan RENJA-PD				Sesudah Perubahan RENJA-PD		
					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	5	6	9	11	12
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	10 Lap	20,000,000.00	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	10 Lap	10,314,500.00
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dok	15,000,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dok	70,916,500.00
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12 Lap	20,000,000.00	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12 Lap	10,925,250.00
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	12 Lap	15,000,000.00	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	12 Lap	8,888,250.00
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	12 Lap	20,000,000.00	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	12 Lap	10,806,500.00
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	21 Dok	140,000,000.00	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	21 Dok	113,299,560.00

Kode					Sebelum Perubahan RENJA-PD				Sesudah Perubahan RENJA-PD		
					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	5	6	9	11	12
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10 Dok	15,000,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10 Dok	12,731,250.00
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	10 Lap	20,000,000.00	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	10 Lap	15,341,400.00
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Perekonomian	10 Lap	15,000,000.00	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Perekonomian	10 Lap	10,348,800.00
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	10 Lap	20,000,000.00	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	10 Lap	10,045,000.00
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11 Dok	15,000,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11 Dok	11,911,250.00
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	11 Lap	20,000,000.00	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	11 Lap	16,149,810.00
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang SDA	11 Lap	15,000,000.00	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang SDA	11 Lap	10,846,500.00

Kode					Sebelum Perubahan RENJA-PD				Sesudah Perubahan RENJA-PD		
					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	5	6	9	11	12
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	11 Lap	20,000,000.00	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	11 Lap	25,925,550.00
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	20 Dok	140,000,000.00	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	20 Dok	142,789,485.00
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dok	15,000,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dok	7,249,765.00
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	8 Lap	20,000,000.00	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	8 Lap	13,100,220.00
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	8 Lap	15,000,000.00	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	8 Lap	7,045,500.00
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	8 Lap	20,000,000.00	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	8 Lap	81,856,350.00
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dok	15,000,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dok	8,442,300.00

Kode					Sebelum Perubahan RENJA-PD				Sesudah Perubahan RENJA-PD		
					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	5	6	9	11	12
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	12 Lap	20,000,000.00	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	12 Lap	10,169,250.00
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	12 Lap	15,000,000.00	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	12 Lap	5,411,000.00
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	12 Lap	20,000,000.00	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	12 Lap	9,515,100.00
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Inovasi di Daerah	10 %	120,000,000.00	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Inovasi di Daerah	10 %	436,606,630.00
5	05	02	2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen kajian bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			Jumlah dokumen kajian bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	3 Dok	328,641,500.00
5	05	02	2.01	001 2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Lap	54,420,900.00
5	05	02	2.01	001 4	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	2 Lap	274,220,600.00
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tersedianya dokumen kajian bidang ekonomi dan pembangunan	1 Dok	40,000,000.00	Tersedianya dokumen kajian bidang ekonomi dan pembangunan	1 Dok	46,358,500.00

Kode					Sebelum Perubahan RENJA-PD				Sesudah Perubahan RENJA-PD		
					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	5	6	9	11	12
5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dok	40,000,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dok	46,358,500.00
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	2 Lap	80,000,000.00	Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	2 Lap	61,606,630.00
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Lap	40,000,000.00	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Lap	38,900,070.00
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Lap	40,000,000.00	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Lap	22,706,560.00
					TOTAL PAGU			3,500,000,000	3,601,360,000		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui mekanisme pelaporan yang transparan dan objektif.

Dalam konteks perencanaan dan pembangunan daerah, akuntabilitas kinerja Bapperida menjadi aspek penting dalam menjamin efektivitas perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan inovasi kebijakan daerah.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bapperida Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja (penentuan posisi), yaitu:

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Bapperida Tahun 2024, berikut adalah merupakan capaian kinerja selama tahun 2024:

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kinerja perencanaan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	40.13	32.69	81%
		Persentase Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan	100	100	100%
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang inovatif	Indeks Inovasi daerah	40	35.01	88%

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing sasaran strategis Bapperida Kabupaten Nias Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya kinerja perencanaan Pemerintahan Daerah

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis 1 (satu), terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan yaitu :

1) Nilai AKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja

Target yang ditetapkan untuk mencapai sasaran adalah 40.13 poin dan terealisasi 32.69 poin. Jika realisasi dibandingkan dengan target maka capaian kinerja adalah 81% atau capaian masih di bawah target, menunjukkan perlunya perbaikan dalam perencanaan dan pengukuran kinerja serta perlu evaluasi lebih lanjut terhadap metode perencanaan yang digunakan dan peningkatan kapasitas SDM terkait. Rumus pencapaian kinerja adalah total bobot komponen perencanaan + bobot komponen pengukuran dengan uraian bobot sebagai berikut :

Komponen	Sub Komponen			
	Sub-Komponen 1 Keberadaan	Sub-Komponen 2 Kualitas	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan	Total Bobot
	20%	30%	50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30

2) Persentase Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan

Target yang ditetapkan pada indicator ini adalah 100% dan terealisasi 100%. Adapun kajian yang telah disusun dan telah dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Kajian pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi Kabupaten Nias Selatan;
2. Roadmap inovasi Kabupaten Nias Selatan;
3. Roadmap penelitian Kabupaten Nias Selatan.

Rumus pencapaian kinerja adalah :

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan} = \frac{\text{Jumlah dokumen kajian yang direkomendasikan sebagai dasar kebijakan pada tahun N}}{\text{seluruh dokumen kajian yang dilaksanakan pada tahun N}} \times 100\% \\
 &= \frac{3}{3} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Hal ini menunjukkan bahwa hasil kajian telah dimanfaatkan secara optimal dalam kebijakan.

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang inovatif

Target untuk mencapai sasaran adalah 40.00 poin dan terealisasi 35.01poin dengan capaian 88% atau hampir mencapai target dimana

Kabupaten Nias Selatan dalam hal ini masih perlu optimalisasi dalam implementasi kebijakan inovatif serta masih perlu kolaborasi dengan pihak eksternal seperti akademisi. Penilaian indikator untuk mencapai sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang inovatif adalah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi IGA (*Innovative Government Award*). Daftar inovasi Kabupaten Nias Selatan yang berhasil masuk dalam penilaian indeks inovasi daerah tahun 2024 kategori inovatif sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 Daftar Inovasi Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024

No	Pelaksana Inovasi	Judul Inovasi
1	Dinas Kesehatan (PKM Gomo)	ANJELI (Antar Jemput Ibu Bersalin)
2	Dinas Pendidikan (SD Swasta Harapan Nias)	CERIA GAMES (Ceria, Efisien, Responsif, Impressive and Amazing Games)
3	Bapperida	E-FURAI (Digitalisasi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)
4	Dinas Kesehatan (PKM Lolomatua)	GARDU KAZIKU (Gerakan Terpadu Edukasi Gizi Isi Piringku)
5	Dinas P2KBP3A	MANTUL (Makan Ikan Telur)
6	Dinas Kesehatan (PKM Lolomatua)	MAWAR INDAH (Mari Ajak Warga Pakai Jamban dan Peduli Sampah)
7	Dinas Kesehatan	OSE (Omasido Sehat)
8	Dinas Pendidikan (SDN Onohondro)	P5 'Ecoprint' (Proyek Penguatan Pelajar Pancasila Ecoprint)
9	Dinas Perizinan	Si Abang Jadi (Jemput Antar Dokumen Izin)
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	SIPAKAN (Sistem Informasi Pengumpul Data Perikanan Budidaya)

Berdasarkan hasil capaian diatas dapat di simpulkan bahwa secara keseluruhan target yang sudah ditetapkan, realisasi kinerja sudah cukup baik dengan capaian 81%-100% atau termasuk kategori penilaian kinerja tinggi dan sangat tinggi. Namun, peningkatan kualitas

perencanaan dan inovasi masih perlu menjadi prioritas Bapperida Kabupaten Nias Selatan agar semua target dapat tercapai secara maksimal.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Karena sasaran strategis di atas merupakan pelaksanaan IKU Bapperida Kabupaten Nias Selatan pada tahun pertama, data perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya belum tersedia secara keseluruhan namun untuk indikator Nilai AKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja dapat di bandingkan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 4 Hasil Evaluasi Akip Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 - 2024

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	15,41	19,22
b. Pengukuran Kinerja	30	6,41	9,91
c. Pelaporan Kinerja	15	9,32	9,53
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	11,40	11,51
Nilai Hasil Evaluasi	100	42,54	50,17
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		C	CC

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	19,22	21,54
b. Pengukuran Kinerja	30	9,91	11,15
c. Pelaporan Kinerja	15	9,53	8,70
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	11,51	12,76
Nilai Hasil Evaluasi	100	50,17	54,15
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC

Berdasarkan tabel diatas dapat dilakukan analisis sebagai berikut :

1. Perbandingan Nilai 2022 vs 2023

- Perencanaan Kinerja: Meningkatkan dari **15,41** menjadi **19,22** (+3,81)
- Pengukuran Kinerja: Meningkatkan dari **6,41** menjadi **9,91** (+3,50)

2. Perbandingan Nilai 2023 vs 2024

- Perencanaan Kinerja: Meningkatkan dari **19,22** menjadi **21,54** (+2,32)
- **Pengukuran Kinerja: Meningkatkan** dari **9,91** menjadi **11,15** (+1,24)

Dari perbandingan ini, dapat dilihat bahwa penilaian komponen perencanaan dan pengukuran kinerja meningkat dari tahun ke tahun yang menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam perencanaan dan pengukuran kinerja.

Namun, untuk tahun mendatang, diharapkan terjadi peningkatan pada Nilai AKIP dan Indeks Inovasi Daerah, terutama dengan lebih banyak program berbasis teknologi dan perencanaan yang lebih terintegrasi serta Bapperida Kabupaten Nias Selatan diharapkan dapat memperkuat sistem monitoring dan evaluasi serta memastikan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pencapaian target yang lebih baik di masa mendatang.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Bahwa Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan perubahan IKU, data perbandingan dengan target jangka menengah tidak tersedia. Namun, dapat disimpulkan bahwa kinerja tahun pertama menunjukkan hasil yang cukup baik, terutama dalam pemanfaatan hasil kajian (100%), sementara aspek perencanaan dan inovasi masih perlu perbaikan untuk mencapai target jangka menengah. Jika ingin mencapai target pada tahun 2029, Bapperida akan melakukan peningkatan tahunan secara bertahap dengan menargetkan pertumbuhan 3-4 poin per tahun pada Nilai AKIP dan Indeks Inovasi Daerah. Selain itu Bapperida juga perlu strategi peningkatan kualitas perencanaan, digitalisasi sistem evaluasi, serta mendorong inovasi berbasis teknologi dan kolaborasi multi-pihak sehingga target dapat tercapai maksimal.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan capaian kinerja tahun pertama pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU), analisis ini mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian target serta alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala.

Tabel 3. 5 Analisis Faktor Keberhasilan dan Kegagalan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
Meningkatnya kinerja perencanaan pemerintahan daerah	Nilai AKIP (Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja)	40.13	32.69	81%	Penyebab Kegagalan: Masih terdapat keterbatasan dalam implementasi sistem pengukuran kinerja dan perencanaan berbasis data. Perlu penguatan koordinasi antarunit dan peningkatan SDM dalam perencanaan strategis.
	Persentase Hasil Kajian yang Dimanfaatkan	100	100	100%	Penyebab Keberhasilan: Komitmen kuat dalam mengintegrasikan hasil kajian ke dalam kebijakan daerah serta sistem koordinasi yang baik antara unit penelitian dan perumus kebijakan.
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang inovatif	Indeks Inovasi Daerah	40	35.01	88%	Penyebab Peningkatan: Adanya upaya dalam mendorong inovasi melalui digitalisasi layanan dan kebijakan inovatif, namun masih terbatas dalam aspek dukungan SDM dan ekosistem inovasi yang berkelanjutan.

Faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja :

1. Faktor keberhasilan

- Komitmen pimpinan dan koordinasi yang baik
- Dukungan terhadap inovasi daerah
- Penerapan sistem perencanaan dan evaluasi berbasis data yang mulai diterapkan, meskipun belum optimal.

2. Faktor kegagalan

- Keterbatasan SDM dan kompetensi teknis dalam implementasi sistem pengukuran kinerja.

- Kurangnya integrasi sistem pengukuran kinerja dengan kebijakan perencanaan daerah.
- Ekosistem inovasi daerah masih terbatas.

Tabel 3. 6 Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

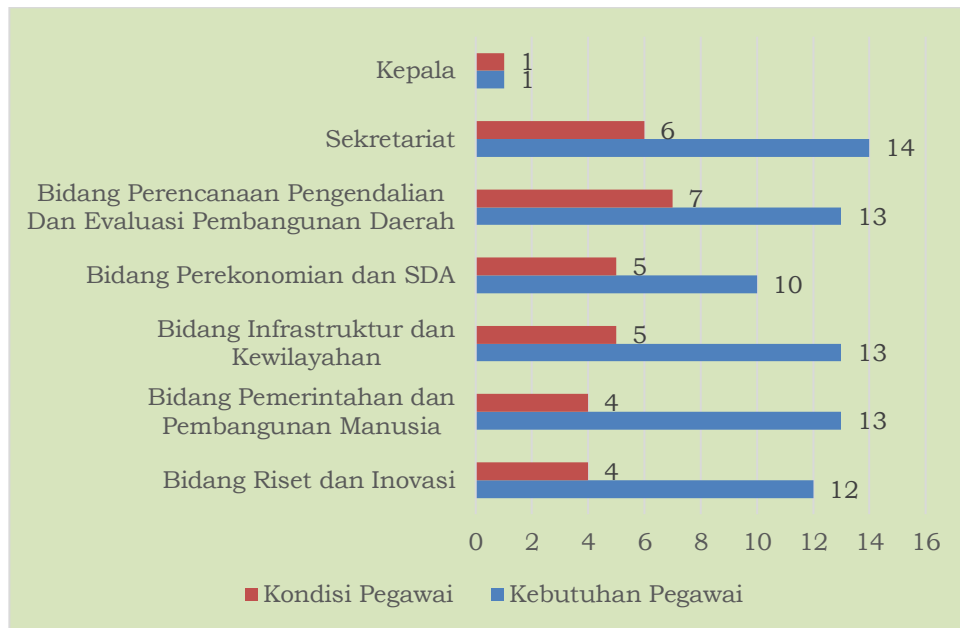
Masalah	Solusi yang Telah Dilakukan	Hasil yang Dicapai
Nilai AKIP belum mencapai target (81%)	- Peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan dan pengukuran kinerja.	Masih dalam proses, namun beberapa perbaikan mulai diterapkan dalam sistem pelaporan dan koordinasi antarunit.
	- Penyelarasan sistem evaluasi kinerja dengan dokumen perencanaan strategis.	
Pemanfaatan hasil kajian sudah mencapai 100%, namun perlu peningkatan kualitas kajian	- Peningkatan metode penelitian yang lebih berbasis data dan evidence-based policy.	Kajian telah dimanfaatkan sepenuhnya dalam kebijakan, tetapi ke depan perlu peningkatan dalam efektivitas dan dampaknya.
	- Meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam penyusunan kajian.	
Indeks Inovasi Daerah belum optimal (88%)	- Pengembangan ekosistem inovasi dengan melibatkan akademisi dan sektor swasta.	Ada peningkatan tetapi masih perlu penguatan regulasi dan dukungan anggaran.
	- Digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan inovasi daerah.	

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

A. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Berdasarkan peta jabatan pegawai, idealnya Bapperida Kabupaten Nias Selatan membutuhkan 76 orang pegawai untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Namun, pada kondisi saat ini, hanya tersedia 32 orang pegawai. Kondisi SDM Bapperida Kabupaten Nias Selatan secara grafik dapat di lihat di bawah ini :

Grafik 3. 1 Kondisi SDM Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024



Dari grafik diatas kondisi SDM Bapperida pada Tahun 2024 menunjukkan adanya kekurangan pegawai yang signifikan di hampir semua bidang. Dengan jumlah pegawai yang hanya 42% dari kebutuhan ideal, pegawai yang tersedia harus menangani lebih banyak tugas dibandingkan dengan kapasitas yang seharusnya.

B. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran

Untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan dan pencapaian keluarannya, Bapperida Kabupaten Nias Selatan mengukur efisiensi *output* program dengan menggunakan rumus :

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program}_i \times COP_i) - RA \text{ Program}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program}_i)} \times 100\%$$

Dimana :

Eop : efisiensi Output Program tingkat unit eselon II

AA Program I : alokasi anggaran program i

RA Program I : realisasi anggaran program i

COP I : capaian Output Program i

N : jumlah program pada suatu unit eselon II

Berdasarkan capaian sasaran, program dan anggaran tahun berjalan berikut adalah merupakan perhitungan efisiensi penggunaan

sumber daya anggaran pada Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 :

Tabel 3. 7 Perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2024			Anggaran 2024				
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (AA)	Realisasi (RA)	AA X COP	(AA X COP)-RA	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)X(7)	(11)=(10)-(9)	(12)=(9)/(8)
1	Meningkatnya kinerja perencanaan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	Poin	40.13	32.69	81%	3,240,902,620	3,122,274,116	2,640,047,512	- 482,226,604	96%
		Persentase Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan	%	100	100	100%	3,240,902,620	3,122,274,116	3,240,902,620	118,628,504	96%
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang inovatif	Indeks Inovasi daerah	Poin	40	35.01	88%	493,179,295	463,447,888	431,655,178	- 31,792,710	94%
Jumlah							6,974,984,535	6,707,996,120	6,312,605,310	- 395,390,810	
$\Sigma((AA \times COP)-RA)/\Sigma(AA)$									-6%		

Dari tabel diatas nilai efisiensi anggaran Bapperida Kabupaten Nias Selatan adalah -6% yang dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran melalui pelaksanaan 4 (empat) program untuk mencapai sasaran adalah masih kurang efisien jika dibandingkan dengan capaian sasaran strategis.

6. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Analisis program/kegiatan/sub-kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja merupakan langkah penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi pemerintah. Dalam mendukung sasaran strategis 1 (satu) terdapat 3 (tiga) program yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 97%.

Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian program ini adalah cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan dengan rumusan ;

$$\frac{\text{Rata – rata capaian kegiatan}}{\text{jumlah kegiatan}} \times 100\%$$

Penyebab program tidak tercapai 100% disebabkan beberapa faktor antara lain rapat-rapat koordinasi dilaksanakan secara online,

pengadaan belum menjadi kebutuhan yang mendesak, barang-barang yang ditargetkan untuk dilakukan pemeliharaan beberapa tidak terlaksana karena kondisi barang masih baik sehingga tidak membutuhkan pemeliharaan dan barang yang lain sudah dalam kondisi rusak. Kegiatan dan sub kegiatan yang menyebabkan target program tidak tercapai adalah :

- *Administrasi Umum Perangkat Daerah*
 - o Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - o Pengadaan Mebel
- *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - o Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - o Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan capaian kinerja 94%. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian program adalah tingkat capaian kinerja program RKPD dengan rumusan :

$$\frac{\text{Rata – rata capaian program OPD}}{\text{Rata – rata capaian kinerja Seluruh OPD}} \times 100\%$$

Ketidaktercapaian program ini dapat disebabkan oleh kendala koordinasi antar pemangku kepentingan, keterlambatan dalam proses penyusunan dokumen, serta faktor teknis lainnya seperti keterbatasan sumber daya manusia. Kegiatan dan sub kegiatan yang tidak tercapai adalah :

- *Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan*
 - o Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian kinerja 100%.

Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian program ini adalah tingkat sinkronisasi Renstra/Renja Perangkat Daerah bidang

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD/RPJMD. Rumusan indikator yaitu :

$$\frac{\text{Jmlh kebijakan yang selaras dengan RKPD/RPJMD}}{\text{Total kebijakan dalam Renstra/Renja}} \times 100\%$$

Pencapaian kinerja maksimal pada program ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor utama:

- Koordinasi yang Efektif: Keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan.
- Ketersediaan Sumber Daya: Dukungan anggaran, SDM yang kompeten, dan teknologi informasi yang menunjang perencanaan.
- Kepatuhan terhadap Regulasi: Penyesuaian dengan kebijakan nasional, RPJMD, dan RKPD yang telah ditetapkan.

dan untuk mendukung sasaran strategis 2 (dua) terdapat 1 (satu) program yakni : Program Penelitian dan Pengembangan dengan capaian kinerja 100%. Rumusan indikator pada program ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah PD yang melakukan inovasi}}{\text{Jumlah Seluruh Perangkat Daerah}} \times 100\%$$

Faktor-faktor yang menyebabkan capaian program ini 100% adalah :

- Komitmen Organisasi: Kepemimpinan yang mendukung inovasi di setiap perangkat daerah.
- Dukungan Kebijakan: Regulasi yang mendorong implementasi penelitian dan pengembangan.
- Ketersediaan Sumber Daya: Alokasi anggaran dan SDM yang memadai untuk pengembangan inovasi.
- Pemanfaatan Teknologi: Penggunaan teknologi dalam mendukung proses inovasi dan penelitian.

Secara keseluruhan program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja dapat dilihat pada laporan monitoring evaluasi pencapaian kinerja Tahun 2024 yang terlampir pada laporan ini.

B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2024 alokasi anggaran Bapperida Kabupaten Nias Selatan untuk mendukung pencapaian sasaran adalah sebesar Rp.3.677.509.250,- (Tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.557.900.731,- (Tiga milyar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu tujuh puluh satu rupiah) atau 96,75% dari alokasi anggaran. Uraian dan capaian realisasi anggaran secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Capaian Realisasi Anggaran Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAAN (%)
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,350,557,170	2,275,155,098	96.79%
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52,498,610	52,498,610	100.00%
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,499,100	7,499,100	100.00%
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7,499,835	7,499,835	100.00%
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7,499,835	7,499,835	100.00%
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7,500,200	7,500,200	100.00%
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7,499,850	7,499,850	100.00%
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7,499,790	7,499,790	100.00%
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,500,000	7,500,000	100.00%
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	156,937,740	155,797,740	99.27%

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	126,960,000	125,820,000	99.10%
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,479,650	7,479,650	100.00%
5	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan Pemeriksaan	7,499,000	7,499,000	100.00%
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7,499,100	7,499,100	100.00%
5	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7,499,990	7,499,990	100.00%
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	10,039,800	10,033,800	99.94%
5	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10,039,800	10,033,800	99.94%
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88,560,000	71,887,760	81.17%
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	27,000,000	27,000,000	100.00%
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	61,560,000	44,887,760	72.92%
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,638,720,620	1,611,615,188	98.35%
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,158,600	12,158,600	100.00%
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	259,093,050	234,620,500	90.55%
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	184,272,970	183,532,750	99.60%
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62,450,000	61,049,681	97.76%
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14,000,000	14,000,000	100.00%

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,000,000	11,921,000	99.34%
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	1,094,746,000	1,094,332,657	99.96%
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18,262,400	18,262,400	100.00%
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18,262,400	18,262,400	100.00%
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159,050,000	155,652,485	97.86%
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,050,000	5,000,000	82.64%
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15,000,000	12,652,485	84.35%
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138,000,000	138,000,000	100.00%
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226,488,000	199,407,115	88.04%
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68,620,000	59,494,590	86.70%
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,118,000	100,021,100	99.90%
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57,750,000	39,891,425	69.08%
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	397,166,155	383,671,130	96.60%
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	300,134,960	286,639,935	95.50%
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	6,240,150	6,240,150	100.00%
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	8,904,000	8,904,000	100.00%
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	44,192,750	44,042,750	99.66%

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAAN (%)
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	19,911,250	19,911,250	100.00%
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	83,418,750	81,773,750	98.03%
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	12,274,500	12,274,500	100.00%
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	125,193,560	113,493,535	90.65%
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	45,688,000	45,688,000	100.00%
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	8,274,000	8,274,000	100.00%
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	17,506,000	17,506,000	100.00%
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	19,908,000	19,908,000	100.00%
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	51,343,195	51,343,195	100.00%
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	30,925,000	30,925,000	100.00%
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	20,418,195	20,418,195	100.00%
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	493,179,295	463,447,888	93.97%
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	218,025,250	217,692,388	99.85%
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10,263,750	10,263,750	100.00%
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10,547,250	10,547,250	100.00%

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9,214,000	9,214,000	100.00%
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	10,314,500	10,314,500	100.00%
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	70,916,500	70,916,500	100.00%
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10,925,250	10,925,250	100.00%
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8,888,250	8,888,250	100.00%
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	86,955,750	86,622,888	99.62%
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	124,254,560	124,254,560	100.00%
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12,731,250	12,731,250	100.00%
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	15,341,400	15,341,400	100.00%
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10,348,800	10,348,800	100.00%
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	15,085,000	15,085,000	100.00%
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12,026,250	12,026,250	100.00%
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	16,149,810	16,149,810	100.00%

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10,846,500	10,846,500	100.00%
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	31,725,550	31,725,550	100.00%
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	150,899,485	121,500,940	80.52%
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7,249,765	7,249,765	100.00%
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	13,100,220	13,099,445	99.99%
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Insfrastruktur	7,045,500	7,045,500	100.00%
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	89,966,350	60,569,980	67.33%
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8,442,300	8,441,700	99.99%
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10,169,250	10,168,550	99.99%
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5,411,000	5,411,000	100.00%
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	9,515,100	9,515,000	100.00%
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	436,606,630	435,626,615	99.78%
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	345,091,500	344,669,135	99.88%
5	05	02	2.01	12	Pengelola Data Kelitbangan dan Peraturan	54,420,900	54,370,300	99.91%

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	290,670,600	290,298,835	99.87%
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	29,908,500	29,766,150	99.52%
5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	29,908,500	29,766,150	99.52%
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	61,606,630	61,191,330	99.33%
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif	38,900,070	38,681,770	99.44%
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	22,706,560	22,509,560	99.13%
TOTAL						3,677,509,250	3,557,900,731	96.75%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kinerja yang telah dilakukan, capaian kinerja Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup baik dengan capaian berkisar antara 81%-100%, yang masuk dalam kategori tinggi dan sangat tinggi. Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh efektivitas koordinasi, pemanfaatan hasil kajian dalam kebijakan, serta penerapan inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Namun, terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan perbaikan, seperti peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja serta optimalisasi indeks inovasi daerah.

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan antara lain:

1. Koordinasi yang Baik: Keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam penyusunan dan implementasi kebijakan.
2. Dukungan Regulasi: Kepatuhan terhadap kebijakan nasional dan daerah.
3. Ketersediaan Sumber Daya: Pemanfaatan SDM dan anggaran yang mendukung pelaksanaan program.
4. Pemanfaatan Teknologi: Digitalisasi dalam evaluasi dan perencanaan pembangunan.

Di sisi lain, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan ketidaktercapaian target, yaitu:

1. Keterbatasan SDM: Kurangnya tenaga ahli dalam pengukuran dan perencanaan kinerja.
2. Kurangnya Integrasi Sistem: Masih perlu peningkatan koordinasi antarunit untuk mendukung efektivitas implementasi program.
3. Ekosistem Inovasi yang Belum Optimal: Keterbatasan dalam mendukung pengembangan inovasi yang berkelanjutan.

B. Saran

1. Peningkatan Kapasitas SDM: Pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai dalam perencanaan dan evaluasi kinerja.

2. **Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi:** Digitalisasi sistem evaluasi untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas pemantauan kinerja.
3. **Peningkatan Kolaborasi Multi-Pihak:** Meningkatkan kerja sama dengan akademisi, sektor swasta, dan masyarakat dalam perencanaan dan inovasi.
4. **Optimalisasi Anggaran dan Sumber Daya:** Menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan prioritas untuk memastikan efisiensi dalam pelaksanaan program.
5. **Pengembangan Kebijakan Berbasis Bukti:** Memastikan setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada data yang valid dan kajian yang mendalam

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II;
2. Rencana Aksi Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024;
3. Rencana Aksi Perubahan Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024;
4. Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024;
5. Foto pelaksanaan kegiatan Bapperida Kabupaten Nias Selatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Saonigehe KM. 3,5, Teluk Dalam, Nias Selatan, Sumatera Utara
Kode Pos 22865

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Abdiel Sonasa Amazihono, SSTP,.M.Ec.Dev**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. Hilarius Duha, SH., MH**
Jabatan : Bupati Nias Selatan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 9 Oktober 2024

Pihak Kedua,



Dr. Hilarius Duha, SH., MH

Pihak Pertama,



Abdiel Sonasa Amazihono, SSTP,.M.Ec.Dev
Pembina Tk. I
NIP. 19830826 200112 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	40.13 (Poin)
		Persentase Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan	100%
2.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang inovatif	Indeks Inovasi daerah	40.00 (Poin)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.350.557.170	APBD
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 397.166.155	APBD
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 493.179.295	APBD
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 436.606.630	APBD
Jumlah		Rp 3.677.509.250	

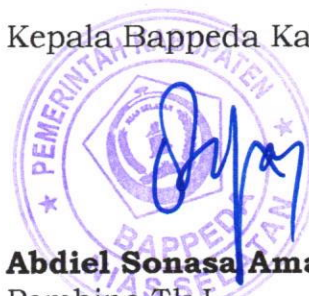
Teluk Dalam, 9 Oktober 2024



Bupati Nias Selatan,

Dr. Hilarius Duha, SH., MH

Kepala Bappeda Kabupaten Nias Selatan,



Abdiel Sonasa Amazihono, SSTP., M.Ec.Dev
Pembina Tk.I

NIP. 19830826 200112 1 002

RENCANA AKSI PERUBAHAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (IKK/IKSK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIWULAN)					
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV		
1	Terwujudnya tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel	Meningkatnya kinerja perencanaan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP komponen perencanaan dan pengukuran kinera	40.13	Poin									Menyempurnakan perjenjangan kinerja, sasaran, indikator strategis setiap perangkat daerah, memastikan IKU Pemda dan Perangkat Daerah dapat dicapai dengan formulasi yang tepat	40.13					
			Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan	100	%									Meningkatkan hasil kajian yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan	25	25	25	25		
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang inovatif	Indeks inovasi daerah	40	Poin									Melaksanakan FGD tentang peningkatan inovasi, melakukan pendampingan terhadap Perangkat Daerah yang berinovasi, menyusun Perbub tentang inovasi			40			
						Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100	%			Melakukan penataan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah	25	25	25	25				
												Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	12	Dok	Menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja tahunan	3	2	4	3
												Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	Menyusun rencana kerja tahunan dan rencana strategis SKPD		1	1	
												Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	Mengkordinasikan dan menyusun Dokumen RKA-SKPD melalui aplikasi SIPD				1
												Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	Mengkordinasikan dan menyusun perubahan Dokumen RKA-SKPD melalui aplikasi SIPD			1	
												Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok	Mengkordinasikan dan menyusun rencana anggaran kas (RAK) dokumen DPA-SKPD melalui aplikasi SIPD				1
												Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	Mengkordinasikan dan menyusun rencana anggaran kas (RAK) dokumen perubahan DPA-SKPD melalui aplikasi SIPD			1	
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Lap	Menyusun PK dan perubahannya, menyusun rencana aksi tahunan untuk pencapaian kinerja,menyusun dan menginput dokumen LKjIP pada web menpan	2			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Lap	Menyusun evaluasi renja triwulan I,II,III dan IV	1	1	1	1										

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (IKK/IKSK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIWULAN)			
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	29	Dok	Menginventarisasi dokumen administrasi keuangan yang harus diselesaikan (SPJ, LPJ, DPA, RKA, LRA, dll.), menentukan prioritas penyelesaian dokumen berdasarkan urgensi dan tenggat waktu	8	7	7	7
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	Org/Bln	Melakukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN setiap bulan	30	30	30	30
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	Menyiapkan LRA, LPE, LO dan rekonsiliasi aset sebagai bahan penyusunan CALK				1
										Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dok	Menyiapkan bahan tanggapan hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPK		1		
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Lap	Menyiapkan LRA, LPE, LO, neraca, BKU Pengeluaran, kartu dan rekap persediaan, rekap sppd, register SPP, SPM dan SP2D, SPJ fungsional , dan bukti pembayaran pajak bulanan	3	3	3	3
										Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dok	Menyusun prognosis realisasi anggaran tahun sebelumnya	1			
										Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah pada SKPD yang tersedia	1	Dok	Melakukan penataan dokumen barang milik daerah	1			
										Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	Menyusun laporan barang milik daerah pada SKPD	1			
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	30	Org	Melakukan penataan administrasi kepegawaian perangkat Daerah	30			
										Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30	Paket	Melakukan pembelian pakaian dinas beserta atri but kelengkapannya	30			
										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Org	Menghadiri dan mengikuti penawaran diklat baik formal maupun non formal		5	5	
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100	%	Melakukan penataan administrasi umum perangkat Daerah	25	25	25	25
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	Paket	Menyediakan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3	3	3	2
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	39	Paket	Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor	10	10	10	9
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47	Paket	Menyediakan bahan logistik kantor berupa ATK dan makanan serta minuman rapat	12	12	12	11
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9	Paket	Menyediakan barang cetakan dan penggandaan	2	2	2	3

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (IKK/IKSK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIWULAN)			
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dok	Menyediakan bahan bacaan berupa koran dan majalah	3	3	3	3
										Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Lap	Memfasilitasi setiap tamu yang berkunjung	3	3	3	3
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350	Lap	Melakukan rapat dan koordinasi baik didalam daerah maupun luar daerah	100	100	100	50
										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	6	Unit	Melakukan pendataan barang yang dibutuhkan oleh OPD, menyusun rencana pengadaan berdasarkan skala prioritas dan urgensi.	6			
										Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	Paket	Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan RKPD dan APBD,melakukan pengadaan melalui e- katalog, menyusun harga perkiraan sendiri (HPS)	6			
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100	%	Mengkoordinir penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	25	25	25	25
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	520	Lap	Membuat laporan penggunaan materai dan benda pos lainnyaa	130	130	130	130
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap	Membuat laporan pembayaran biaya internet setiap bulan (Indihome)	3	3	3	3
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap	Membuat laporan pembayaran jasa tenaga harian lepas (Supir, Jaga Malam, Kebersihan dan Operator)	3	3	3	3
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	77	Unit	Melakukan pemeliharaan barang milik daerah	19	20	19	19
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	Unit	Memelihara dan melakukan pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2	2	2	2
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	Melakukan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		1		
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	68	Unit	Memelihara sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	17	17	17	17
						Meningkatnya efektifitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tingkat capaian kinerja program RKPD	100	%					Menentukan target kinerja program RKPD sesuai dengan RPJMD dan prioritas pembangunan daerah,menyusun indikator kinerja yang terukur (SMART:	25	25	25	25
										Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang tersusun	17	Dok	Melakukan pemetaan terhadap jenis dokumen perencanaan dan pendanaan yang harus disusun, Mengidentifikasi unit kerja atau pihak terkait yang bertanggung jawab atas penyusunan dokumen perencanaan	9	6	2	

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (IKK/IKSK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIWULAN)			
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV
										Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2	Dok	Melakukan analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah	1	1		
										Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5	Dok	Menelaah dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya (dok RKP, RKPD PROV, RPJPD,RPJMD,RTRW)	5			
										Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	BA	Melaksanakan konsultasi publik rancangan awal RKPD	1	1		
										Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat	35	BA	Melaksanakan forum SKPD/Lintas SKPD	35			
										Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	BA	Menyelenggarakan musrenbang RKPD Kabupaten/Kota	1	1		
										Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	350	Usulan	Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan musrenbang kecamatan	350			
										Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4	Dok	Menyusun dan menetapkan dokumen RKPD dan perubahannya, serta menetapkan dokumen RPJPD 2025 - 2045		2	2	
										Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	Melakukan analisis data dan informasi Pemerintahaan Daerah	25	75		
										Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3	Dok	Menyusun analisis data untuk kebijakan perencanaan pembangunan daerah	3			
										Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	63	Orang	Melakukan sosialisasi penginputan Renja ke dalam aplikasi SIPD-RI		63		
										Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	Buku	Mengumpulkan data-data berupa gambaran umum kondisi daerah dan data capaian pembangunan daerah Kabuten Nias Selatan		1		
										Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah	5	Dok	Melakukan pengendalian dan evaluasi serta menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban perencanaan pembangunan daerah	2	1	1	1
										Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	Lap	Menyusun LKPJ	1			
										Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	Lap	Melakukan monitoring dan menyusun laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan Daerah	1	1	1	1
						Meningkatnya konsistensi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, SDA, dan	Tingkat Sinkronisasi Renstra/Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia dengan RKPD/RPJMD	100	%					Mengkoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	25	25	25	25

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (IKK/IKSK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIWULAN)			
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV
						Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat Sinkronisasi Renstra/Renja Perangkat Daerah bidang SDA dan Perekonomian dengan RKPD/RPJMD	100	%					Mengkoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA	25	25	25	25
							Tingkat Sinkronisasi Renstra/Renja Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan kewilayahan dengan RKPD/RPJMD	100	%					Mengkoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	25	25	25	25
										Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	22	Dok	Mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		12	10	
										Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10	Dok	Mengarsipkan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan yang di koordinir penyusunannya		10		
										Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10	Lap	Membuat laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan		10		
										Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10	Lap	Melaksanakan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan			10	
										Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	10	Lap	Membuat laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan			10	
										Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12	Dok	Mengarsipkan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan manusia yang di koordinir penyusunannya		12		
										Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12	Lap	Membuat laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia		12		
										Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12	Lap	Melaksanakan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia			12	
										Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	12	Lap	Membuat laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia			12	
							Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		21	Dok	Mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA		11	10	

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (IKK/IKSK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIWULAN)			
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV
										Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	10	Dok	Mengarsipkan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian yang di koordinir penyusunannya		10		
										Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10	Lap	Membuat laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian		10		
										Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	10	Lap	Melaksanakan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian			10	
										Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	10	Lap	Membuat laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian			10	
										Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	11	Dok	Mengarsipkan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang di koordinir penyusunannya		11		
										Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	11	Lap	Membuat laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA		11		
										Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	11	Lap	Melaksanakan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA			11	
										Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	11	Lap	Membuat laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja perencanaan pembangunan daerah bidang SDA			11	
										Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	20	Dok	Mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan		12	8	
										Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8	Dok	Mengarsipkan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur yang di koordinir penyusunannya		8		
										Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	8	Lap	Membuat laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur		8		
										Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	8	Lap	Melaksanakan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur			8	

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (IKK/IKSK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIWULAN)													
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV										
										Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	8	Lap	Membuat laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur			8											
										Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	12	Dok	Mengarsipkan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan yang di koordinir penyusunannya		12												
										Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12	Lap	Membuat laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan		12												
										Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12	Lap	Melaksanakan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Kewilayahan			12											
										Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	12	Lap	Membuat laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan			12											
							Meningkatnya hasil kelitbangan dan inovasi daerah	Persentase PD yang inovatif	10	%					Asistensi inovasi ke OPD, menyusun roadmap SIDA				10									
											Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen kajian bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2	Dok	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan			1	1									
																				Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1	Lap	Mengidentifikasi jenis data kelitbangan yang perlu dikelola (hasil penelitian, kajian kebijakan, inovasi daerah, dll.), mengklasifikasikan peraturan yang berlaku (Perda, Perkada, Surat Edaran, Keputusan Kepala Daerah, dll.), menentukan format standar untuk dokumentasi dan penyimpanan data.			1	
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1	Lap	Menghimpun data dari OPD, hasil pengkajian, serta masukan dari pemangku kepentingan, melakukan verifikasi dan validasi data untuk memastikan akurasi informasi dan menyusun laporan fasilitasi				1																				

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (IKK/IKSK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIWULAN)			
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV
										Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tersedianya dokumen kajian bidang ekonomi dan pembangunan	1	Dok	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan			1	
										Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1	Lap	Melaksanakan penelitian dan pengembangan Pekerjaan Umum			1	
										Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	2	Dok	Melakukan Pengembangan Inovasi dan Teknologi		1		1
										Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat inovatif	1	Lap	Melakukan pendampingan terhadap Perangkat Daerah yang menerapkan inovasi		1		
										Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	Lap	Menyusun laporan hasil kelitbangan				1



LAPORAN MONITORING EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (IKK/IKSK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIWULAN)				Total Target	CAPAIAN (TRIWULAN)				Total Capaian	Tercapai		
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV		I	II	III	IV		Ya	Tidak	
1	Terwujudnya tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel	Meningkatnya kinerja perencanaan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP komponen perencanaan dan pengukuran kinerja	40.13	Poin									Menyempurnakan perjanjian kinerja, sasaran, indikator strategis setiap perangkat daerah, memastikan IKU Pemda dan Perangkat Daerah dapat dicapai dengan formulasi yang tepat	40.13					40.13			32.69		32.69	v	
			Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan sebagai dasar	100	%									Meningkatkan hasil kajian yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	v		
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang inovatif	Indeks inovasi daerah	40	Poin									Melaksanakan FGD tentang peningkatan inovasi, melakukan pendampingan terhadap Perangkat Daerah yang berinovasi, menyusun Perbub tentang inovasi			40		40				35.01	35.01	v		
						Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100	%					Melakukan penataan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah	25	25	25	25	100	16	24	31	26	97	v		
											Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	12	Dok	Menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja tahunan	3	2	4	3	12	4	1	6	1	12	v	
											Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	Menyusun rencana kerja tahunan dan rencana strategis SKPD		1	1		2		2		2	v		
											Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	Mengkoordinasikan dan menyusun Dokumen RKA-SKPD melalui aplikasi SPD				1	1		1		1	v		
											Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	Mengkoordinasikan dan menyusun perubahan Dokumen RKA-SKPD melalui aplikasi SPD			1		1	1		1		1	v	
											Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok	Mengkoordinasikan dan menyusun rencana anggaran kas (RAK) dokumen DPA-SKPD melalui aplikasi SPD				1	1		1		1	v		
											Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	Mengkoordinasikan dan menyusun rencana anggaran kas (RAK) dokumen perubahan DPA-SKPD melalui aplikasi SPD			1		1		1		1	v		
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Khtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Lap	Menyusun PK dan perubahannya, menyusun rencana aksi tahunan untuk pencapaian kinerja, menyusun dan menginput dokumen LKJP pada web merpan	2				2	2				2	v	
											Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Lap	Menyusun evaluasi renja triwulan I,II dan IV	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	v	
											Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	29	Dok	Menginventarisasi dokumen administrasi keuangan yang harus diselesaikan (SPJ, LPJ, DPA, RKA, LRA, dll), menentukan prioritas penyelesaian dokumen berdasarkan urgensi dan tenggat waktu	8	7	7	7	29	8	7	8	6	29	v	
											Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	Org/Bln	Melakukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN setiap bulan	30	30	30	30	30	30	30	30	32	32	v	
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	Menyapkan LRA, LPE, LO dan rekonsiliasi aset sebagai bahan penyusunan CALK				1	1	1				1	v	
											Pengelolaan dan Penykapn Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dok	Menyapkan bahan tanggapan hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPK		1			1				1		1	v

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (KK/IKSK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIWULAN)					Total Target	CAPAIAN (TRIWULAN)					Total Capaian	Tercapai	
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV	I		II	III	IV	Ya	Tidak			
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme- steran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme- steran SKPD	12	Lap	Menyapkan LRA, LPE, LO, neraca, BKU Pengeluaran, kartu dan rekap persediaan, rekap sppd, register SPP,SPM dan SP2D, SPJ fungsional, dan bukti pembayaran pajak bulanan	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	√			
										Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dok	Menyusun prognosis realisasi anggaran tahun sebelumnya	1				1				1	1	√			
										Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah pada SKPD yang tersedia	1	Dok	Melakukan penataan dokumen barang milik daerah	1								1	1	√			
										Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	Menyusun laporan barang milik daerah pada SKPD	1								1	1	√			
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	30	Org	Melakukan penataan administrasi kepegawaian perangkat Daerah	30								30	30	√			
										Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30	Paket	Melakukan pembelian pakaian dinas beserta atrib but kelengkapannya	30								30	30	√			
										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Org	Menghadiri dan mengikuti penawaran diklat baik formal maupun non formal			5	5					6	6		√		
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100	%	Melakukan penataan administrasi umum perangkat Daerah	25	25	25	25	100	2	17	36	42	97		√		
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	Paket	Menyediakan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3	3	3	2	11					11	11	√		
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	39	Paket	Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor	10	10	10	9	39		10	7	22	39	√			
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47	Paket	Menyediakan bahan logistik kantor berupa ATK dan makanan serta minuman rapat	12	12	12	11	47		23	12	12	47	√			
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9	Paket	Menyediakan barang cetakan dan penggandaan	2	2	2	3	9		2	3	4	9	√			
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dok	Menyediakan bahan bacaan berupa koran dan majalah	3	3	3	3	12				6	6	12	√		
										Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Lap	Memfasilitasi setiap tamu yang berkunjung	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	√			
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350	Lap	Melakukan rapat dan koordinasi baik didalam daerah maupun luar daerah	100	100	100	50	350	40	73	93	58	264		√		
										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	6	Unit	Melakukan pendataan barang yang dibutuhkan oleh OPD, menyusun rencana pengadaan berdasarkan skala prioritas dan urgensi.	6				6				2	2		√		
										Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	Paket	Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan RKPD dan APBD,melakukan pengadaan melalui e- katalog, menyusun harga perkiraan sendiri (HPS).	6				6				2	2		√		
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100	%	Mengkoordinir penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	25	25	25	25	100	17	26	23		66		√		
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	520	Lap	Membuat laporan penggunaan materi dan benda pos lainnya	130	130	130	130	520		150	100	250	500		√		
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap	Membuat laporan pembayaran biaya internet setiap bulan (Indihome)	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	√			
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap	Membuat laporan pembayaran jasa tenaga harian lepas (Supir, Jaga Malam, Kebersihan dan Operator)	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	√			
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	77	Unit	Melakukan pemeliharaan barang milik daerah	19	20	19	19	77		6	22	24	52		√		

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (KSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (KP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (KK/IKSK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIWULAN)				Total Target	CAPAIAN (TRIWULAN)				Total Capaian	Tercapai	
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			I	II		III	IV	I	II		III	IV	Ya	Tidak			
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8	Unit	Memelihara dan melakukan pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2	2	2	2	8		2	2	4	8	√	
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	Melakukan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		1			1		1			1	√	
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	68	Unit	Memelihara sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	17	17	17	17	68		3	20	20	43		√
						Meningkatnya efektifitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tingkat capaian kinerja program RKPD	100	%					Menentukan target kinerja program RKPD sesuai dengan RPJMD dan prioritas pembangunan daerah, menyusun indikator kinerja yang terukur (SMART:	25	25	25	25	100	17	33	23	22	94		√
										Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang tersusun	17	Dok	Melakukan pemetaan terhadap jenis dokumen perencanaan dan pendanaan yang harus disusun, Mengidentifikasi unit kerja atau pihak terkait yang bertanggung jawab atas penyusunan dokumen perencanaan	9	6	2		17	4	8	4		16		√
										Analisis Kondisi Daerah, Pemmasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2	Dok	Melakukan analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah	1	1			2	1		1		2	√	
										Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5	Dok	Menelaah dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya (dok RKP, RKPD PROV, RPJPD, RPJMD, RTRW)	5				5		5			5	√	
										Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	BA	Melaksanakan konsultasi publik rancangan awal RKPD	1	1			2	1	1			2	√	
										Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	35	BA	Melaksanakan forum SKPD/Lintas SKPD	35				35	28		7		35	√	
										Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	BA	Menyelenggarakan musrenbang RKPD Kabupaten/Kota	1	1			2	1	1			2	√	
										Penyapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	350	Usulan	Menyapkan bahan koordinasi pelaksanaan musrenbang kecamatan	350				350		616			616	√	
										Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPMD/RKPD)	4	Dok	Menyusun dan menetapkan dokumen RKPD dan perubahannya, serta menetapkan dokumen RPJPD 2025 - 2045		2	2		4			3		3		√
										Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	Melakukan analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah	25	75			100		33	67		100	√	
										Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3	Dok	Menyusun analisis data untuk kebijakan perencanaan pembangunan daerah	3				3		3			3	√	
										Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	63	Orang	Melakukan sosialisasi penginputan Renja ke dalam aplikasi SPD-RI		63			63			63		63	√	
										Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	Buku	Mengumpulkan data-data berupa gambaran umum kondisi daerah dan data capaian pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan		1			1			1		1	√	
										Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah	5	Dok	Melakukan pengendalian dan evaluasi serta menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban perencanaan pembangunan daerah	2	1	1	1	5		3	1	1	5	√	
										Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	Lap	Menyusun LKPJ	1				1		1			1	√	

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (KSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (KP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (KK/IRKSK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIWULAN)					Total Target	CAPAIAN (TRIWULAN)					Total Capaian	Tercapai	
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			I	II		III	IV	I	II	III		IV	Ya	Tidak					
										Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	Lap	Melakukan monitoring dan menyusun laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan Daerah	1	1	1	1	4		2	1	1	4	√			
						Meningkatnya konsistensi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia dengan RKPD/RPJMD	Tingkat Sinkronisasi Renstra/Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia dengan RKPD/RPJMD	100	%					Mengkoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	25	25	25	25	100		50	50		100	√			
							Tingkat Sinkronisasi Renstra/Renja Perangkat Daerah bidang SDA dan Perekonomian dengan RKPD/RPJMD	100	%					Mengkoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA	25	25	25	25	100		50	50		100	√			
							Tingkat Sinkronisasi Renstra/Renja Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan kewilayahan dengan RKPD/RPJMD	100	%					Mengkoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	25	25	25	25	100		50	50		100	√			
										Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	22	Dok	Mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		12	10		22		12	10		22	√			
										Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10	Dok	Mengarsipkan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan yang di koordinir penyusunannya		10			10		10			10	√			
										Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10	Lap	Membuat laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan		10			10		10			10	√			
										Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10	Lap	Melaksanakan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan			10		10		10			10	√			
										Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	10	Lap	Membuat laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan			10		10			10		10	√			
										Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12	Dok	Mengarsipkan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan manusia yang di koordinir penyusunannya		12			12		12			12	√			
										Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12	Lap	Membuat laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia		12			12		12			12	√			
										Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12	Lap	Melaksanakan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia			12		12			12		12	√			
										Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	12	Lap	Membuat laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia			12		12			12		12	√			
										Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	21	Dok	Mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA		11	10		21		11	10		21	√			

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (KSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (KP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (KK/KSK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIWULAN)				Total Target	CAPAIAN (TRIWULAN)				Total Capaian	Tercapai	
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV		I	II	III	IV		Ya	Tidak
										Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10	Dok	Mengarsipkan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian yang di koordinir penyusunannya		10			10		10			10	✓	
										Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10	Lap	Membuat laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian		10			10		10			10	✓	
										Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	10	Lap	Melaksanakan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian			10		10				10	✓		
										Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	10	Lap	Membuat laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian			10		10				10	✓		
										Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11	Dok	Mengarsipkan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang di koordinir penyusunannya		11			11		11			11	✓	
										Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	11	Lap	Membuat laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA		11			11		11			11	✓	
										Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	11	Lap	Melaksanakan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA			11		11				11	✓		

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (KSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (KP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (KK/KSK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIWULAN)				Total Target	CAPAIAN (TRIWULAN)				Total Capaian	Tercapai	
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV		I	II	III	IV		Ya	Tidak
										Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	11	Lap	Membuat laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja perencanaan pembangunan daerah bidang SDA			11	11			11	v				
										Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan wilayah	20	Dok	Mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan wilayah		12	8	20		12	8	20	v			
										Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	Dok	Mengarsipkan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur yang di koordinir penyusunannya		8		8		8		8	v			
										Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	8	Lap	Membuat laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur		8		8		8		8	v			
										Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	8	Lap	Melaksanakan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur		8		8		8		8	v			
										Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	8	Lap	Membuat laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur		8		8		8		8	v			
										Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12	Dok	Mengarsipkan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Wilayah yang di koordinir penyusunannya		12		12		12		12	v			
										Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	12	Lap	Membuat laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Wilayah		12		12		12		12	v			
										Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	12	Lap	Melaksanakan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Wilayah		12		12		12		12	v			
										Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Wilayah	12	Lap	Membuat laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja perencanaan pembangunan daerah bidang Wilayah		12		12		12		12	v			
					Meningkatnya hasil keltibangan dan inovasi daerah		Persentase PD yang inovatif	10	%					Asistensi inovasi ke OPD, menyusun roadmap SIDA			10	10			10	10	v			
										Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen kajian bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2	Dok	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan			1	1	2			2	2	v		
										Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1	Lap	Mengidentifikasi jenis data keltibangan yang perlu dikelola (hasil penelitian, kajian kebijakan, inovasi daerah, dll), mengklasifikasikan peraturan yang berlaku (Perda, Perkada, Surat Edaran, Keputusan Kepala Daerah, dll), menentukan format standar untuk dokumentasi dan penyimpanan data.			1		1			1	1	v		
										Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1	Lap	Menghimpun data dari OPD, hasil pengkajian, serta masukan dari pemangku kepentingan, melakukan verifikasi dan validasi data untuk memastikan akurasi informasi dan menyusun laporan fasilitasi			1	1			1	1	v			

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (IKK/IKSK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIWULAN)				Total Target	CAPAIAN (TRIWULAN)				Total Capaian	Tercapai	
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV		I	II	III	IV		Ya	Tidak
										Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tersedianya dokumen kajian bidang ekonomi dan pembangunan	1	Dok	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan			1		1			1	1	√		
										Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1	Lap	Melaksanakan penelitian dan pengembangan Pekerjaan Umum			1		1			1	1	√		
										Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	2	Dok	Melakukan Pengembangan Inovasi dan Teknologi		1		1	2			2	2	√		
										Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	1	Lap	Melakukan pendampingan terhadap Perangkat Daerah yang menerapkan inovasi		1		1			1	1	√			
										Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibatan	1	Lap	Menyusun laporan hasil kelibatan				1	1			1	1	√		





Ekspose Roadmap Inovasi



FGD Roadmap Inovasi